

ETIKA BISNIS DIGITAL DALAM TRANSFORMASI UMKM : STUDI FENOMENOLOGI PELAKU USAHA MARKETPLACE

Andrianto, Muh. Nashiruddin Darajat, Juliana Zahra

Universitas Muhammadiyah Lamongan, Indonesia

Corresponding author: andrianto914@umla.ac.id

ABSTRACT**Keywords:**

Accounting Ethics; Digital MSMEs; Financial Accountability; Digital Marketplace; Phenomenological Study.

Article history:

Received March 2026

Revised April 2026

Accepted April 2026

The rapid growth of digital marketplaces has transformed the business practices of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, particularly in transaction processing and financial management. This study aims to explore how MSME actors experience, interpret, and apply business ethics and accounting ethics within digital marketplace-based business activities. Using a qualitative phenomenological approach, data were collected through in-depth semi-structured interviews and contextual observations involving MSME owners who actively utilize digital marketplaces such as Shopee, Tokopedia, and TikTok Shop. The data were analyzed using thematic phenomenological analysis based on the Colaizzi model. The findings reveal that although marketplaces provide objective and systematically recorded digital transaction data, these data are not fully integrated into MSMEs' internal accounting systems. Accounting practices tend to be partial and situational, with frequent omissions of transaction components such as platform service fees, discounts, and sales returns, as well as the mixing of personal and business finances. These practices indicate weak internalization of accounting ethical principles, including integrity, objectivity, professional competence, and accountability. The study demonstrates that digitalization alone does not automatically foster ethical accounting behavior among MSMEs. The novelty of this research lies in its phenomenological insight into the ethical meanings constructed by MSME actors in digital accounting practices, highlighting the gap between technological transparency and ethical accountability. The study concludes that strengthening accounting ethics through digital accounting literacy, ethical education, and system integration is essential to support sustainable and accountable MSME development in the digital economy.

Pendahuluan

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong atas peningkatan perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan, bahwa sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah sektor bisnis yang mampu bertahan dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi nasional. Salah satu yang masih teringat dalam benak kita adalah adanya gejolak ekonomi moneter di Indonesia tahun 1998 dan 2008, dimana sektor inilah yang mampu bertahan dalam menghadapi goncangan badai ekonomi yang begitu besar. Dengan melalui sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini pulalah, keberadaannya sangat membuat masyarakat untuk selalu dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam

menyalurkan transformasi ide – ide inovasi dan kreasinya dengan memanfaatkan atas sumber daya alam yang tersedia. Hingga saat ini UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 75 juta yang tersebar di berbagai daerah, dengan jumlah yang begitu besar inilah menjadikannya sektor UMKM ini menjadi penyokong utama perekonomian selain koperasi.

Perkembangan ekonomi digital dewasa ini juga menjadi salah satu pendorong bagi masyarakat dalam melakukan kreativitas ide dan inovasi dalam membawa perubahan bagi cara pelaku Usaha, Mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Pemanfaatan adanya platform digital market place seperti Shopee, Tokopedia, dan Tiktok Shop tentunya membawa angin segar dalam membuka akses pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong pertumbuhan usaha yang begitu cepat. Transformasi digital ini tentunya tidak hanya berdampak pada aspek pemasaran dan operasional saja, tetapi juga pada bagaimana sistem pencatatan, pengelolaan dan pelaporan keuangan UMKM yang semakin bergantung pada teknologi digital.

Dalam perspektif ilmu akuntansi tersebut, digitalisasi bisnis menuntut adanya bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat berjalan dengan begitu ketat dan lebih tinggi daripada prinsip lainnya. Adanya sistem informasi akuntansi yang berbasis digital tersebut, diharapkan dapat memungkinkan adanya bagaimana proses pencatatan transaksi menjadi begitu lebih cepat dan terintegrasi. Praktik pelaporan keuangan yang dianggap tidak sepenuhnya dapat mencerminkan bagaimana kondisi usaha dapat berjalan sebagaimana mestinya, pengabaian pencatatan transaksi digital hingga manipulasi data keuangan demi kepentingan tertentu yang menjadikan fenomena yang sering masih dijumpai pada bisnis berskala UMKM tersebut.

Hal ini menjadikan tantangan tersendiri dengan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi digital dengan pemahaman serta bagaimana penerapan etika bisnis dan etika profesi akuntansi oleh pelaku UMKM. Sebagian dari pelaku UMKM tersebut masih dirasa memandang pencatatan dan pelaporan keuangan hanyalah pada sebatas kewajiban administrative, bukan pada sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan professional kepada pemangku kepentingan. Tentunya kondisi ini dapat berpotensi dapat melemahkan atas kualitas informasi keuangan itu sendiri, mengurangi keandalan laporan keuangan, serta dapat menghambat atas terciptanya tata kelola usaha yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Selain itu peran transformasi digital dalam bentuk marketplace dianggap dan mampu sebagai mediator dalam transaksi digital dimana hal ini merupakan implementasi atas implikasi terhadap akuntabilitas keuangan UMKM. Disisi lain pula, keberadaan market place mampu menyediakan beragam sistem transaksi

yang mampu tersimpan dan terdokumentasi dengan baik dan rapi secara digital serta relatif transparan. Namun disisi lain pula, adanya kompleksitas sistem, biaya layanan, serta kurangnya integrasi sistem akuntansi internal UMKM yang seringkali dianggap selalu menyulitkan pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan etika pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini pula mampu menimbulkan pertanyaan pada mengenai atas sejauh mana dari ekosistem marketplace mampu mendukung atau justru menjadi penghambat dalam penerapan etika akuntansinya pada praktik bisnis digital UMKM.

Berdasarkan pada kondisi demikian, kajian atas etika bisnis digital dalam ruang lingkup akuntansi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada pemahaman pengalaman pelaku UMKM dalam menerapkan atas bagaimana prinsip etika bisnis dan akuntansi dibangun di tengah informasi digital dengan melalui marketplace. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini diharapkan dapat mampu menjelaskan dan mampu untuk mengungkap pada makna etika, akuntabilitas dan transparansi keuangan yang sebagaimana hal ini dipersepsikan dan dipraktikkan oleh pelaku UMKM, serta mampu dianggap memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan etika akuntansi di era ekonomi digital ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pada bagaimana pengalaman, pemaknaan dan kesadaran etis pelaku UMKM dalam melaksanakan dan menerapkan atas prinsip – prinsip akuntansi dan etika bisnis di era digital. Dengan pendekatan ini mampu menempatkan pelaku UMKM sebagai subyek utama yang secara langsung sendiri mengalami atas transformasi praktik akuntansi sebagai akibat adanya penerapan digitalisasi bisnis, khususnya pada bagaimana pemanfaatan platform marketplace. Fenomenologi ini memungkinkan peneliti dapat menggali realitas subyektif pelaku usaha terkait pada bagaimana mereka memahami, menafsirkan, dan mempraktikkan atas nilai-nilai etika akuntansi dalam proses pencatatan, pengelolaan dan pelaporan keuangan secara digital.

Pemilihan konsep metode fenomenologi ini didasarkan pada pandangan bahwa praktik etika akuntansi dalam bisnis digital dianggap tidaklah semata-mata ditentukan oleh pada bagaimana aspek teknis sistem informasi akuntansi, tetapi juga dipengaruhi pada bagaimana nilai, persepsi dan pertimbangan moral individu dalam pengambilan keputusan keuangan. Dalam konteks UMKM demikian, keputusan terkait atas pengakuan transaksi, kelengkapan pencatatan, serta pada

bagaimana penyajian laporan keuangan sering kali bersifat personal dan situasional, sehingga hal ini tidak dapat sepenuhnya dapat dijelaskan dengan melalui pendekatan kuantitatif atau pengukuran variabel semata. Oleh karena itu pula, fenomenologi digunakan untuk mengungkap atas makna di balik tindakan keilmuan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku UMKM, termasuk pada dilema etis yang mereka hadapi dalam lingkungan bisnis digital yang dianggap dinamis.

Dengan demikian, metode pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan atas pemahaman secara komprehensif mengenai esensi adanya etika akuntansi dalam praktik bisnis digital UMKM. Dengan temuan penelitian ini tidak hanya mampu untuk berkontribusi pada pengembangan atas kajian etika akuntansi dalam konteks digitalisasi, tetapi juga diharapkan memberikan landasan konseptual bagi perumusan rekomendasi praktis terkait bagaimana penguatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan UMKM berbasis pada teknologi marketplace.

Subyek penelitian ini adalah pelaku UMKM yang menjalankan bisnis usaha secara aktif dengan memanfaatkan platform marketplace digital (seperti Shopee, Tokopedia, dan Tiktok Shop). Obyek penelitian dalam penelitian ini meliputi pada praktik pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan UMKM berbasis pada digital, penerapan atas prinsip etika bisnis dan etika akuntansi dalam sistem informasi akuntansi UMKM, peran marketplace dalam mempengaruhi atas akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Kriteria informan ditetapkan secara purposive dengan ketentuan : [1]. UMKM telah beroperasi di market place selama 1 tahun; [2]. Memiliki praktik pencatatan keuangan, baik manual maupun digital; [3]. Terlibat langsung dalam pengambilan keputusan keuangan dan kebijakan pelaporan. Jumlah informan sekitar 6-10 orang, dengan penentuan akhir berdasarkan pada prinsip saturasi data, yaitu ketika wawancara tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan.

Pada teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui beberapa teknik berikut yaitu ; [a]. wawancara mendalam semi terstruktur, dilakukan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan terkait dengan praktik pencatatan transaksi digital melalui market place, penyusunan laporan keuangan UMKM, pemahaman dan penerapan prinsip etika akuntansi (kejujuran, obyektifitas, tanggung jawab dan transparansi), tantangan etis dalam pengelolaan data keuangan digital; [b]. observasi kontekstual, dilakukan terhadap praktik operasional UMKM di marketplace, untuk memahami atas alur transaksi, dokumentasi keuangan dan penggunaan sistem informasi akuntansi.

Dalam melakukan teknik analisis data menggunakan analisis tematik fenomenologis dengan mengadaptasi model Colaizzi yang meliputi ada tahapan berikut ; [1]. Transkripsi dan pembacaan menyeluruh, seluruh hasil wawancara ditranskripsikan secara verbatim dan dibaca berulang untuk memperoleh

pemahaman menyeluruh mengenai pengalaman informan terkait praktik akuntansi dan etika bisnis digital;[2]. Identifikasi pernyataan signifikan, peneliti mengidentifikasi pernyataan – pernyataan penting yang berkaitan dengan fenomena etika akuntansi, sistem informasi akuntansi, akuntabilitas dan pelaporan keuangan UMKM; [3]. Formulasi makna, pernyataan signifikan dianalisis untuk dirumuskan makna esensialnya, khususnya yang mencerminkan sikap etis, praktik pencatatan dan pengambilan keputusan akuntansi pelaku UMKM.

Adapun Lokasi penelitian dilakukan pada UMKM digital yang beroperasi di Desa Saimbang Kabupaten Lamongan dengan waktu penelitian pada periode bulan Januari – Februari 2026.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pada hasil wawancara mendalam terhadap informan, pelaku UMKM yang menjadi subyek penelitian adalah berasal dari berbagai sektor usaha, seperti meliputi perdagangan ritel, kuliner dan produk-produk kreatif. Pada seluruh informan tersebut dengan memanfaatkan platform marketplace digunakan sebagai saluran utama penjualan dan transaksi. Adanya ketergantungan terhadap sistem digital ini merupakan cermin dari pernyataan informan yang menjelaskan bahwa seluruh proses penjualan dan penerimaan pembayaran telah terdokumentasi secara elektronik :*"sejak masuk marketplace hampir seluruh penjualan saya lakukan lewat situ. Pembayaran, laporan penjualan sampai pada rekap harian sudah tersedia secara digital."*(I3). Dalam perspektif pada prinsip obyektifitas dan akuntabilitas, keberadaan pada data transaksi digital yang terdokumentasi secara sistematis seharusnya menjadi penopang kuat dalam penyusunan laporan keuangan yang bersifat andal. Data marketplace mampu menyediakan bukti transaksi yang relatif obyektif dan dapat ditelusuri, sehingga secara etis hal ini mendukung atas kewajiban pelaku usaha untuk menyajikan adanya informasi keuangan secara jujur dan transparan.

Namun demikian, pada hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa pemanfaatan digital marketplace tersebut dianggap masih belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem informasi akuntansi UMKM. Dimana sebagian informan telah menggunakan aplikasi pencatatan keuangan yang terhubung dengan data penjualan marketplace; *"saya sudah memakai aplikasi pencatatan keuangan, jadi data dari marketplace bisa saya cocokkan dengan catatan keuangan usaha."* (I5).

Praktik ini mampu mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip integritas dan kompetensi profesional, dimana pelaku UMKM berusaha untuk menyusun laporan keuangan yang lebih sistematis dan konsisten dengan transaksi aktual, dimana integrasi pencatatan digital tersebut dapat lebih berpotensi dalam

meningkatkan kualitas informasi akuntansi serta memperkuat akuntabilitas keuangan usaha. Sebaliknya, bagi sebagian informan masih mengandalkan pencatatan manual ataupun semi digital yang tidak terintegrasi dengan sistem marketplace: *“transaksi di marketplace memang rapi, tapi untuk laporan keuangan saya masih catat manual, kadang tidak semuanya masuk.”*(I1).

Dalam konteks pada prinsip kejujuran dan kelengkapan (*integrity and completeness*), adanya praktik pencatatan yang dilakukan tidaklah begitu menyeluruh dan hal ini berpotensi dapat menimbulkan distorsi informasi keuangan. Dimana ketidaksesuaian antara transaksi digital dan laporan keuangan internal yang mencerminkan lemahnya penerapan prinsip obyektivitas serta meningkatkan risiko bias dalam pelaporan. Lebih lanjut demikian, beberapa informan mengakui bahwa transaksi tertentu, seperti potongan biaya layanan marketplace, diskon dan retur penjualan, tidaklah selalu dicatat dalam laporan keuangan *“kalau potongan dari marketplace atau retur, sering pula tidak saya masukkan ke dalam laporan, biar lebih sederhana.”*(I2).

Adanya praktik tersebut tentunya hal ini menunjukkan adanya dilema etis dalam pelaporan keuangan, dimana kemudahan operasional dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi dan tanggung jawab profesional. Dalam etika profesi akuntansi, adanya kegiatan penyederhanaan pencatatan yang dapat menghilangkan informasi material sangatlah bertentangan dengan kewajiban menyajikan laporan keuangan secara wajar dan lengkap, meskipun demikian hal ini dilakukan tanpa niat manipulatif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi akuntansi pada UMKM digital masih bersifat parsial dan situasional. Dimana prinsip akuntabilitas dan transparansi baru diimplementasikan ketika terdapat tuntutan eksternal, sementara dalam praktik sehari - hari pun masih dapat ditemui adanya pengabaian terhadap prinsip integritas, obyektifitas dan kompetensi profesional. Sehingga dengan demikian, adanya digitalisasi melalui marketplace belum dapat dikatakan secara otomatis dapat membentuk perilaku akuntansi yang etis, melainkan hal ini memerlukan adanya internalisasi nilai etika profesi akuntansi agar sistem informasi akuntansi digital benar - benar berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban keuangan yang berintegritas.

Penerapan Prinsip Etika dalam Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan

Hasil analisis fenomenologis dapat menunjukkan bahwa pemaknaan etika akuntansi oleh pelaku UMKM yang masih didominasi oleh pertimbangan praktis dan instrumental, seperti adanya kemudahan pencatatan, penghematan waktu serta kebutuhan pemenuhan laporan hanya untuk pemangku kepentingan tertentu saja, misalnya pelaporan pajak atau pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan.

Adanya etika akuntansi yang belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dalam menyajikan informasi keuangan yang jujur, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini pula tercermin dari pernyataan salah satu informan berikut “*Kalau laporan keuangan biasanya saya buat kalau memang dibutuhkan, misalnya untuk pajak atau kalau mau ajukan pinjaman. Kalau tidak, ya dicatat seperlunya saja.*” (I4)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa adanya prinsip akuntabilitas pelaporan keuangan masih dianggap bersifat situasional dan bergantung pada tuntutan eksternal. Dalam perspektif pula etika profesi akuntansi, kondisi ini dapat mencerminkan belum terinternalisasinya prinsip tanggung jawab profesional, dimana penyusunan laporan keuangan seharusnya dilakukan secara konsisten sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya ketika terdapat kebutuhan administratif. Lebih lanjut demikian, beberapa informan mengungkapkan bahwa tidak seluruh transaksi marketplace dicatat secara lengkap dalam laporan keuangan internal UMKM.

Transaksi yang sering diabaikan biasanya meliputi biaya layanan platform, retur penjualan serta transaksi promosi dan diskon. Salah satu informan menyampaikan “*biasanya yang saya catat hanya penjualan bersihnya saja, fee marketplace ataupun diskon promo sering tidak dimasukkan ke laporan.*” (I2)

Adanya praktik pencatatan yang tidak lengkap ini biasanya akan menciptakan kesenjangan antara data transaksi digital yang sebenarnya dengan laporan keuangan yang disusun oleh pelaku UMKM. Dari sudut pandang etika akuntansi, hal ini merupakan pengabaian terhadap transaksi – transaksi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip kejujuran (*integrity*) dan kelengkapan informasi (*completeness*). Meskipun demikian, hal ini dilakukan dengan alasan penyederhanaan pencatatan, dimana praktik ini berpotensi dapat menurunkan kualitas informasi keuangan dan dianggap menyesatkan pengambilan keputusan berbasis laporan keuangan. Selain itu pula, informan juga mengakui bahwa pencatatan transaksi sering kali dilakukan secara perkiraan tanpa adanya rekonsiliasi dengan data transaksi digital dari marketplace” *Saya jarang mencocokkan laporan keuangan dengan data marketplace secara detail, yang penting kira – kira sudah tahu untungnya.*” (I1).

Dalam konteks prinsip obyektifitas, prinsip praktik tersebut lebih menunjukkan bahwa laporan keuangan belum sepenuhnya disusun berdasarkan pada bukti transaksi yang dapat diverifikasi. Padahal, atas data transaksi marketplace mampu menyediakan atas beragam sumber informasi yang relatif obyektif dan terdokumentasi, yang seharusnya dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan prinsip transparansi dan keandalan laporan keuangan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan prinsip etika akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM digital masih dapat dikatakan menghadapi tantangan serius. Dimana kesenjangan antara ketersediaan data transaksi digital dengan praktik pencatatan internal masih mencerminkan rendahnya kesadaran etis terhadap pentingnya obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu pula, adanya penguatan etika profesi akuntansi perlu menjadi bagian integral yang penting dalam pengembangan sistem informasi akuntansi UMKM berbasis digital, agar kemudahan teknologi ini tidak justru mengaburkan adanya prinsip tanggung jawab etis dalam penyajian informasi keuangan.

Pola ini juga mencerminkan pada lemahnya penerapan prinsip integritas dan perilaku profesional sebagaimana diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia (IAI0, yang lebih menekankan bahwa penyajian informasi keuangan harus dilakukan secara jujur, konsisten dan bertanggung jawab terlepas dari ada atau tidaknya tekanan eksternal yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Lebih lanjut pula, praktik ketidaklengkapan pencatatan transaksi digital ini khususnya terkait biaya layanan marketplace, diskon dan retur penjualan juga menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip obyektivitas. Dalam kode etik IAI, obyektivitas menuntut adanya penyajian informasi keuangan yang dapat dikatakan bebas dari bias dan didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi. Temuan bahwa pelaku UMKM lebih memilih untuk menyederhanakan pencatatan ini dilakukan demi kemudahan operasional dengan mengindikasikan bahwa pertimbangan efisiensi masih dianggap lebih dominan dibandingkan kewajiban etis untuk menyajikan informasi keuangan secara wajar dan lengkap.

Selain itu pula, lemahnya praktik kegiatan rekonsiliasi antara data transaksi marketplace dengan laporan keuangan internal dianggap mencerminkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam kode etik IAI, hal ini ditegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam penyusunan informasi keuangan memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas dan keandalan informasi keuangan yang memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas pelaporan keuangan tersebut melalui penggunaan keahlian profesional secara memadai. Dimana ketidakteraturan dalam memanfaatkan atas data transaksi digital ini sebagai dasar penyusunan laporan keuangan menjelaskan bahwa adanya potensi sistem informasi akuntansi digital dianggaplah belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pemaknaan etika oleh pelaku UMKM masih dapat dikatakan terbatas pada aspek hubungan dengan pelanggan, seperti kejujuran dalam transaksi jual beli, sementara etika pelaporan keuangan belumlah dipahami sebagai bagian dari tanggungjawab profesional yang lebih luas. Tentunya kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman etika bisnis secara umum dengan etika

profesi akuntansi sebagaimana dirumuskan dalam kode etik akuntan Indonesia. Dalam konteks akuntansi, etika akuntansi tidak hanya berkaitan dengan perilaku terhadap pihak eksternal, tetapi juga lebih mencakup kewajiban moral dalam menyusun dan menyajikan atas informasi keuangan yang dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan atas hasil penelitian ini menegaskan bahwa adanya digitalisasi UMKM dengan melalui platform marketplace yang dilakukan belum secara otomatis dapat mendorong terbentuknya praktik akuntansi yang etis. Adanya teknologi ini dapat menyediakan data transaksi yang obyektif dan transparan, namun tanpa adanya internalisasi prinsip kode etik akuntan Indonesia yang khususnya integritas, obyektifitas, kompetensi dan perilaku profesional dimana sistem informasi akuntansi digital berpotensi hanya menjadi alat administratif. Oleh karena itu, penguatan etika profesi akuntansi yang perlu menjadi bagian integral dari upaya pengembangan akuntansi UMKM digital, baik melalui edukasi, pendampingan maupun perancangan sistem yang dapat mendorong kepatuhan etis secara berkelanjutan.

Peran Marketplace dalam Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace sering dipersepsikan oleh pelaku UMKM sebagai platform yang dianggap dapat menyediakan atas data transaksi yang relatif transparan dan terdokumentasi secara sistematis. Dimana informan menyatakan bahwa seluruh aktivitas penjualan, penerimaan pembayaran, hingga potongan biaya layanan dilakukan secara tercatat otomatis dalam sistem marketplace dan dapat diakses kapan saja. Dimana kondisi ini dapat memberikan kapan saja.

Dengan kondisi ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memantau kinerja penjualan secara real time, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan berikut “*Di Marketplace semua sudah tercatat mulai dari penjualan harian, pembayaran masuk, sampai fee yang dipotong oleh platform. Tinggal buka aplikasi saja.*” (I4).

Keberadaan data transaksi digital yang lengkap dan terdokumentasi tersebut secara teoritis dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan UMKM. Dalam perspektif akuntansi, data transaksi yang terekam secara sistematis dan teratur dapat berfungsi sebagai bukti obyektif dalam penyusunan laporan keuangan yang andal. Namun demikian, hasil penelitian dapat menjelaskan bahwa adanya potensi transparansi yang disediakan oleh marketplace belum sepenuhnya yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pelaporan keuangan UMKM.

Kurangnya integrasi antara sistem marketplace dengan sistem informasi akuntansi internal UMKM menjadikan salah satu faktor utama yang dapat menghambat pemanfaatan data transaksi digital secara optimal.

Beberapa informan mengungkapkan bahwa data dari marketplace hanyalah digunakan sebagai bahan pemantauan penjualan, tanpa diolah lebih lanjut menjadi laporan keuangan yang sistematis. *"Biasanya saya hanya lihat total penjualannya saja dari marketplace, untuk laporan keuangan tidak sampai sedetail itu."* (I1).

Dalam beberapa kasus demikian, informan menyatakan bahwa terdapat perhitungan laba yang dilakukan secara kasar dengan cara mengurangi estimasi biaya dari total penjualan, tanpa dilakukan proses pencatatan akun yang memadai. *" yang penting saya tahu kira - kira untung berapa. Tidak sampai bikin laporan laba rugi secara lengkap"*. (I2).

Praktik tersebut lebih kepada menunjukkan bahwa marketplace lebih difungsikan sebagai alat transaksi dan pemantauan atas omset penjualan, bukanlah sebagai sumber data akuntansi yang dapat mendukung akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam konteks demikian, adanya etika akuntansi dapatlah dianggap mencerminkan lemahnya atas penerapan prinsip akuntabilitas dan obyektifitas, dimana data transaksi yang seharusnya menjadi dasar penyusunan laporan keuangan tidaklah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu pula, keterbatasan literasi akuntansi digital juga turut mempengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam mengintegrasikan data marketplace ke dalam sistem akuntansi internal. Salah satu informan mengungkapkan *" datanya memang ada, tapi saya kurang paham cara mengolahnya menjadi laporan keuangan."* (I6).

Temuan ini menjelaskan bahwa adanya transparansi yang disediakan oleh marketplace dapat bersifat potensial, namun demikian hal ini belum dapat dikatakan teraktualisasi dalam bentuk pelaporan keuangan yang akuntabel. Dengan kata lain pula, adanya ketersediaan teknologi dan data digital masih dapat belum secara otomatis dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan UMKM tanpa adanya dukungan kompetensi akuntansi dan kesadaran etis pelaku usaha. Secara keseluruhan pula, atas hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran marketplace dalam mendukung adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan UMKM masih dapat bersifat tidak langsung. Adanya marketplace dapat menyediakan infrastruktur data transaksi yang obyektif dan transparan, namun demikian atas pemanfaatannya sebagai sumber data akuntansi masih sangat bergantung pada kemampuan UMKM dalam mengintegrasikan sistem tersebut dengan praktik pencatatan dan pelaporan keuangan internal. Oleh karena itu pula, adanya penguatan peran marketplace dalam akuntabilitas keuangan UMKM masih memerlukan dukungan berupa peningkatan literasi akuntansi digital serta pengembangan sistem informasi akuntansi yang mampu mengolah data transaksi

digital secara etis dan sistematis. Riwayat penjualan, penerimaan pembayaran serta biaya layanan yang tercatat secara otomatis dapat memberikan potensi besar bagi UMKM untuk meningkatkan adanya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Dalam perspektif keilmuan akuntansi, adanya ketersediaan data transaksi yang dapat bersifat obyektif dan dapat ditelusuri tersebut seharusnya menjadikan hal ini sebagai dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan relevan bagi pengambilan keputusan. Namun demikian, atas hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa potensi tersebut belum secara penuh teraktualisasi secara optimal dalam praktik pelaporan keuangan UMKM. Keberadaan marketplace lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat transaksi dan pemantauan penjualan daripada sebagai sumber data akuntansi. Kondisi ini tentunya menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan informasi digital dengan kemampuan UMKM dalam mengolah informasi tersebut menjadi laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks demikian, transparansi yang disediakan oleh marketplace bersifat teknologis, tetapi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi transparansi akuntansi.

Dari sudut pandang prinsip etika profesi akuntansi, khususnya obyektifitas dan akuntabilitas, temuan ini dapat menunjukkan bahwa data transaksi digital belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai bukti obyektif dalam penyusunan laporan keuangan. Kode etik akuntan Indonesia telah menjelaskan bahwa penyajian informasi keuangan harus didasarkan pada data yang dapat diverifikasi dan disusun secara jujur serta bertanggung jawab. Ketika pelaku UMKM hanya lah menggunakan data marketplace untuk perhitungan laba secara kasar tanpa adanya pencatatan dan pengklasifikasian yang dapat memadai, maka fungsi etis akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban akhirnya menjadi tereduksi berkurang.

Lebih lanjut demikian, lemahnya integrasi antara sistem marketplace dan sistem informasi akuntansi internal UMKM tersebut lebih mencerminkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Adanya ketersediaan data digital tersebut tidaklah secara otomatis dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan apabila pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan akuntansi yang memadai untuk mengolah data tersebut. Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa digitalisasi akuntansi tidak hanya menuntut adopsi teknologi, tetapi juga lebih kepada penguatan kompetensi dan kesadaran etis dalam pengelolaan informasi keuangan.

Hasil penelitian ini juga dapat mengindikasikan bahwa prinsip akuntabilitas keuangan UMKM masih dapat dipahami secara terbatas sebagai alat pemantauan

kinerja internal, bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban formal kepada pemangku kepentingan. Dalam kerangka tata kelola keuangan, laporan keuangan seharusnya lebih berfungsi sebagai sarana komunikasi yang dapat mencerminkan pada kondisi keuangan usaha secara wajar dan transparan. Ketika marketplace tidak dimanfaatkan sebagai sumber data akuntansi, maka peluang untuk membangun tata kelola keuangan UMKM yang lebih akuntabel dan berkelanjutan menjadi terhambat.

Secara keseluruhan, dalam pembahasan ini lebih menjelaskan bahwa peran marketplace dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan UMKM sangatlah bergantung pada integrasi antara teknologi, sistem informasi akuntansi dan internalisasi prinsip etika profesi akuntansi. Marketplace menyediakan fondasi data transaksi yang bersifat obyektif, namun tanpa dukungan sistem akuntansi yang memadai dan pemahaman etika yang kuat, transparansi tersebut hanyalah bersifat operasional. Oleh karena itu pula, adanya upaya penguatan akuntabilitas keuangan UMKM di era digital perlu diarahkan tidak hanya pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada peningkatan literasi akuntansi dan penerapan prinsip etika profesi secara konsisten dalam praktik pelaporan keuangan UMKM.

Permasalahan Etika Akuntansi dalam Bisnis Digital UMKM

Hasil analisis tematik dari hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa praktik akuntansi UMKM di era bisnis digital masih dapat dikatakan menghadapi berbagai permasalahan etika yang bersifat mendasar. Adanya permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pada keterbatasan teknis pencatatan, tetapi juga lebih mencerminkan pada bagaimana pelaku UMKM dapat memaknai fungsi dan peran akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Temuan ini juga menjelaskan bahwa peran digitalisasi transaksi dengan melalui marketplace belum secara otomatis dapat membentuk praktik akuntansi yang etis dan akuntabel. Permasalahan pertama yang menonjol adalah adanya ketidaklengkapan pencatatan transaksi digital, meskipun pada seluruh transaksi penjualan yang dilakukan tercatat secara otomatis di marketplace, dan tidak semua data tersebut dicatat kembali secara lengkap dalam laporan keuangan secara internal bagi pelaku bisnis UMKM. Transaksi seperti potongan biaya layanan platform, diskon promosi, dan retur penjualan sering kali diabaikan, sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut : *"Biasanya yang saya catat hanya penjualan bersihnya saja. Fee marketplace dan retur sering tidak saya masukkan ke laporan."* (I2).

Dalam perspekti etika atas profesi akuntansi, praktik ini lebih menuntut untuk mencerminkan lemahnya pada penerapan atas prinsip integritas dan obyektivitas, karena dalam laporan keuangan tidak sepenuhnya dapat disusun berdasarkan pada bukti transaksi yang sebenarnya. Secara fenomenologis, kondisi

ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM dapat dimaknai dengan pencatatan keuangan sebagai aktivitas yang dapat disederhanakan sesuai dengan kebutuhan praktis, bukanlah pada sebagai kewajiban etis yang harus dilakukan secara konsisten. Permasalahan kedua, adalah minimnya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, sebagian besar informan mengakui bahwa arus kas pribadi dan usaha seringkali masih tercampur, sehingga sulit untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan pada kondisi usaha secara akurat dan nyata: *“uang usaha dan uang pribadi masih jadi satu. Kalau ambil untuk kebutuhan pribadi ya langsung ambil aja.”*(I1).

Dalam konteks etika akuntansi, praktik ini selalu bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan perilaku profesional, hal ini dikarenakan adanya pengaburan atas batas pertanggungjawaban keuangan usaha. Adanya fenomena ini mampu untuk merefleksikan pada bagaimana cara pandang pelaku UMKM yang masih melihat pada bagaimana usaha sebagai bagian dari keuangan pribadi, bukan pada sebagai entitas ekonomi yang memerlukan pada pertanggungjawaban atas formal kepada pemangku kepentingan.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan rendahnya literasi akuntansi dan pemahaman terhadap etika profesi akuntansi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun pelaku UMKM terbiasa menggunakan teknologi digital, maka atas pemahaman tentang prinsip akuntansi dan etika pelaporan keuangan masih dianggap sangat terbatas. Salah satu informan menyatakan *“ kalau soal akuntansi saya kurang paham, yang penting usaha jalan dan tidak menipu pembeli.”* (I5). Pernyataan ini menunjukkan bahwa etika lebih dimaknai sebagai kejujuran dalam transaksi jual beli, bukanlah sebagai tanggung jawab profesional dalam penyajian informasi keuangan yang wajar dan dapat dipercaya. Dalam hal perspektif fenomenologi, atas kejadian ini lebih dianggap mencerminkan kesenjangan antara pengalaman penggunaan teknologi digital dan pemaknaan atas nilai etis dalam praktik akuntansi.

Permasalahan keempat adalah tidak adanya mekanisme pengendalian dan audit internal sederhana. Sebagian besar informan menyatakan bahwa tidak terdapat proses pemeriksaan atau pengawasan terhadap pencatatan keuangan, karena seluruh aktivitas usaha dikelola sendiri *“tidak ada yang mengecek laporan keuangan, karena usaha ini saya kelola sendiri.”*(I3). Ketiadaan pengendalian internal ini dapat meningkatkan risiko kesalahan, bias dan penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Dari sudut pandang etika profesi akuntansi, kondisi tersebut lebih menunjukkan pada lemahnya penerapan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, dimana yang menuntut adanya upaya sistematis untuk menjaga kualitas dan keandalan informasi keuangan. Secara keseluruhan, permasalahan

etika akuntansi yang ditemukan dalam penelitian ini lebih menunjukkan bahwa praktik akuntansi UMKM digital masih berorientasi pada kebutuhan jangka pendek dan kepentingan praktis, seperti kemudahan pencatan dan pemantauan laba, dibandingkan pada penyediaan informasi keuangan yang andal, transparan dan etis, dibandingkan pada penyediaan informasi keuangan yang andal, transparan dan etis. Dalam konteks fenomenologi demikian, temuan ini dapat merefleksikan pada bagaimana pelaku UMKM dapat memaknai atas konsep keilmuan akuntansi yang lebih sebagai alat administrative daripada sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan professional kepada pemangku kepentingan.

Oleh karena itu dalam penguatan etika profesi akuntansi perlu menjadi bagian integral dari pengembangan akuntansi UMKM di era digital, seiring dengan peningkatan atas literasi akuntansi dan penguatan atas sistem pengendalian internal yang dianggap sederhana namun efektif. Permasalahan etika akuntansi dalam bisnis digital UMKM lebih bersifat multidimensional dan tidaklah semata – mata disebabkan oleh keterbatasan teknis pencatatan keuangan. Dimana permasalahan tersebut lebih mencerminkan bagaimana cara pelaku UMKM lebih memaknai atas fungsi akuntansi dalam konteks usaha digital. Meskipun demikian transaksi telah terdigitalisasi dengan melalui marketplace, praktik akuntansi yang dijalankan masih dianggap menunjukkan adanya kelemahan atas internalisasi dari nilai-nilai etika profesi akuntansi. Adanya permasalahan utama berupa ketidaklengkapan pencatatan transaksi digital diindikasikan bahwa pelaku UMKM belum sepenuhnya dapat memandang laporan keuangan sebagai representasi yang harus dapat mencerminkan pada kondisi usaha secara wajar dan utuh. Dimana pengabaian terhadap transaksi seperti potongan biaya layanan diskon, dan retur penjualan dapat menunjukkan bahwa prinsip integritas dan obyektivitas sebagaimana ditegaskan dalam kode etik akuntan Indonesia belumlah menjadi landasan utama dalam praktik penyusunan dan pelaporan keuangan.

Dalam perspektif fenomenologi demikian, dapat mampu merefleksikan atas pemaknaan akuntansi sebagai aktivitas fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan praktis, bukan sebagai kewajiban etis yang mengikat, minimnya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha juga menjadi permasalahan etika yang signifikan. Pencampuran arus kas mencerminkan lemahnya prinsip akuntabilitas dan perilaku professional, karena batas pertanggungjawaban keuangan usaha menjadi kabur. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih memandang usaha sebagai bagian dari keuangan pribadi, bukan sebagai entitas ekonomi yang memerlukan pertanggungjawaban formal. Dimana kondisi ini dapat berimplikasi pada rendahnya bagaimana kualitas informasi keuangan dan meningkatnya risiko bias dalam pengambilan keputusan berbasis laporan keuangan.

Rendahnya literasi akuntansi dan pemahaman terhadap etika profesi

akuntansi semakin memperkuat permasalahan etika yang ditemukan. Dimana etika sering kali dimaknai secara sempit sebagai kejujuran dalam bertransaksi dengan pelanggan, sementara itu etika atas pelaporan keuangan tersebut dilakukan belum dapat dipahami sebagai rasa tanggung jawab professional terhadap pemangku kepentingan yang dirasa lebih luas. Pada konteks demikian, bahwa digitalisasi bisnis dianggap tidak secara otomatis dapat meningkatkan kesadaran etis pelaku UMKM, bahkan demikian berpotensi dapat memperkuat praktik pragmatis yang dapat mengabaikan prinsip akuntansi yang berlaku. Selain itu demikian, atas ketiadaan dari mekanisme pada pengendalian dan audit internal secara sederhana dapat mencerminkan pada lemahnya penerapan prinsip kompetensi dan kehati-hatian professional. Tanpa adanya proses pemeriksaan dan pengawasan demikian, laporan keuangan UMKM menjadikan hal yang rentan terhadap kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Dalam perspektif etika akuntansi, kondisi ini dapat menunjukkan bahwa adanya praktik akuntansi UMKM yang belum sepenuhnya difokuskan pada penyediaan informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan professional.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menjelaskan bahwa adanya permasalahan etika akuntansi dalam bisnis digital UMKM berakar pada orientasi jangka pendek dan pemaknaan akuntansi yang bersifat administrative. Dimana akuntansi belum dapat dipahami sebagai instrument pertanggungjawaban moral kepada pemangku kepentingan, melainkan sebagai alat bantu operasional yang digunakan secara situasional. Oleh karena itu, adanya penguatan etika profesi akuntansi sangatlah perlu menjadi bagian dari integral pada transformasi digital UMKM, dengan melalui peningkatan literasi akuntansi, internalisasi dari prinsip kode etik ikatan akuntan Indonesia, serta bagaimana pengembangan sistem informasi akuntansi yang dapat mendorong praktik pelaporan keuangan yang berintegritas dan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya transformasi digital UMKM dilakukan dengan melalui pemanfaatan platform marketplace yang belum secara otomatis dapat mendorong terbentuknya praktik akuntansi yang etis, transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, marketplace dapat menyediakan data transaksi digital yang dianggap relatif obyektif, terdokumentasi dan mudah diakses, dimana pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan UMKM yang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis ke dalam praktik akuntansi internal. Temuan fenomenologis tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM cenderung dimaknai keilmuan akuntansi sebagai alat

administratif dan praktis untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu, seperti pelaporan pajak atau pengajuan pembiayaan, bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional kepada seluruh pemangku kepentingan.

Lebih lanjut demikian, penelitian ini dapat menemukan adanya beragam permasalahan atas etika akuntansi dalam praktik bisnis digital UMKM, yang antara lain adanya ketidaklengkapan pencatatan transaksi digital, pengabaian biaya layanan marketplace, diskon dan retur penjualan, pencampuran keuangan pribadi dan usaha, rendahnya literasi akuntansi, serta ketiadaan mekanisme pengendalian dan audit internal sederhana, khususnya prinsip integritas, obyektivitas, kompetensi profesional dan akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam kode etik akuntan Indonesia. Dengan demikian, digitalisasi bisnis melalui marketplace dianggap lebih banyak berperan sebagai sarana operasional transaksi daripada sebagai instrumen pendukung atas tata kelola keuangan UMKM yang beretika dan berkelanjutan.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan etika akuntansi perlu menjadi bagian integral dalam pengembangan UMKM digital. Dari sisi praktis dan kebijakan, diperlukan program peningkatan literasi akuntansi digital bagi pelaku UMKM yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai etika profesi akuntansi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan penyedia platform marketplace diperlukan untuk mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi antara data transaksi digital dan sistem informasi akuntansi UMKM, sehingga dapat mendorong praktik pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jenis usaha UMKM, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan metode kuantitatif guna menguji hubungan antara tingkat literasi akuntansi digital, internalisasi etika profesi, dan kualitas pelaporan keuangan UMKM. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji peran regulasi, insentif kebijakan, serta desain sistem marketplace dalam membentuk perilaku akuntansi yang etis dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

Daftar Pustaka

- Alleyne, P., & Lavine, M. (2013). Factors influencing accountants' behavioural intentions to use and actual usage of enterprise resource planning systems in a global development agency. *Journal of Financial Reporting & Accounting*.
- Amponsah, E. (2024). Principle of Professional Competence and Due Care: Sequel to Academics' Defiance. *Research Journal of Finance and Accounting*.
- Andrianto. (2025a). *Sustainability Accounting : Theoretical Integration and Approaches*

Conceptual. 0(02), 954–966. <https://doi.org/10.47191/jefms/v8>

- Andrianto, A. (2016). PENCATATAN AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP)(Studi Kasus Pada PD. Pasar Larangan-Sidoarjo). *Majalah Ekonomi*, 22(2), 185–192.
- Andrianto, A. (2025b). TANTANGAN PERPAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL: STUDI FENOMENOLOGI DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA. *Majalah Ekonomi*, 31(2), 60–79.
- Arifin, R., Ningsih, A. A. T., & Putri, A. K. (2021). The important role of MSMEs in improving the economy. *East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(6), 52–59.
- Berthelot, S., Cormier, D., & Magnan, M. (2003). Environmental disclosure research: a review and synthesis. *Journal of accounting literature*, 22(1), 1–44.
- Eldenburg, L., Hermalin, B. E., Weisbach, M. S., & Wosinska, M. (2004). Governance, performance objectives and organizational form: evidence from hospitals. *Journal of Corporate Finance*, 10(4), 527–548.
- Firdausya, L. Z., & Ompusunggu, D. P. (2023). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Era Digital Abad 21: Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Era Digital Di Abad Ke-21. *Tali Jagad Journal*, 1(1), 14–18.
- Goglio, S., & Catturani, I. (2019). Sustainable Finance: A Common Ground for the Future in Europe? In *The Rise of Green Finance in Europe: Opportunities and Challenges for Issuers, Investors and Marketplaces* (hal. 239–261). Springer.
- Haniffa, R. (2001). *Social responsibility disclosure: An Islamic perspective*.
- Hariyanti, S., & Kristanti, D. (2024). Digital transformation in MSMEs: An overview of challenges and opportunities in adopting digital technology. *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 37–46.
- Holmes, K., Marriott, L., & Randal, J. (2012). Ethics and experiments in accounting. *Pacific Accounting Review*.
- Ismael, A. Y. A. (2017). The Impact of Creative Accounting Techniques on the Reliability of Financial Reporting with Particular Reference to Saudi Auditors and Academics. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 283–291.
- Krisdiyawati, K., & Maulidah, H. (2023). Analisis implementasi akuntansi digital guna pencatatan keuangan pada umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 6(1), 100–106.
- Lestari, S. (2026). Digital Transformation and Governance in MSMEs: Qualitative

- Perspectives on Financial Accountability in Banten, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 50–62.
- Lubis, I. (2021). The Role of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Recovery of the National Economic. *Syiah Kuala Law Journal*, 5(2), 238–251.
- Mohammed, N. F., Fahmi, F. M., & Ahmad, A. E. (2015). The influence of AAOIFI accounting standards in reporting Islamic financial institutions in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 31, 418–424.
- Murshed, N. A., & Ugurlu, E. (2023). Navigating the Digital Marketplace: A Holistic Model Integrating Social Media Engagement and Consumer Behavior Factors to Enhance Online Shopping Adoption. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 16(3).
- Alleyne, P., & Lavine, M. (2013). Factors influencing accountants' behavioural intentions to use and actual usage of enterprise resource planning systems in a global development agency. *Journal of Financial Reporting & Accounting*.
- Amponsah, E. (2024). Principle of Professional Competence and Due Care: Sequel to Academics' Defiance. *Research Journal of Finance and Accounting*.
- Andrianto. (2025a). *Sustainability Accounting : Theoretical Integration and Approaches Conceptual*. 0(02), 954–966. <https://doi.org/10.47191/jefms/v8>
- Andrianto, A. (2016). PENCATATAN AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP)(Studi Kasus Pada PD. Pasar Larangan-Sidoarjo). *Majalah Ekonomi*, 22(2), 185–192.
- Andrianto, A. (2025b). TANTANGAN PERPAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL: STUDI FENOMENOLOGI DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA. *Majalah Ekonomi*, 31(2), 60–79.
- Arifin, R., Ningsih, A. A. T., & Putri, A. K. (2021). The important role of MSMEs in improving the economy. *East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(6), 52–59.
- Berthelot, S., Cormier, D., & Magnan, M. (2003). Environmental, disclosure research: a review and synthesis. *Journal of accounting literature*, 22(1), 1–44.
- Eldenburg, L., Hermalin, B. E., Weisbach, M. S., & Wosinska, M. (2004). Governance, performance objectives and organizational form: evidence from hospitals. *Journal of Corporate Finance*, 10(4), 527–548.
- Firdausya, L. Z., & Ompusunggu, D. P. (2023). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Era Digital Abad 21: Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Era Digital Di Abad Ke-21. *Tali Jagad Journal*, 1(1), 14–18.
- Goglio, S., & Catturani, I. (2019). Sustainable Finance: A Common Ground for the

- Future in Europe? In *The Rise of Green Finance in Europe: Opportunities and Challenges for Issuers, Investors and Marketplaces* (hal. 239–261). Springer.
- Haniffa, R. (2001). *Social responsibility disclosure: An Islamic perspective*.
- Hariyanti, S., & Kristanti, D. (2024). Digital transformation in MSMEs: An overview of challenges and opportunities in adopting digital technology. *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 37–46.
- Holmes, K., Marriott, L., & Randal, J. (2012). Ethics and experiments in accounting. *Pacific Accounting Review*.
- Ismael, A. Y. A. (2017). The Impact of Creative Accounting Techniques on the Reliability of Financial Reporting with Particular Reference to Saudi Auditors and Academics. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 283–291.
- Krisdiyawati, K., & Maulidah, H. (2023). Analisis implementasi akuntansi digital guna pencatatan keuangan pada umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(1), 100–106.
- Lestari, S. (2026). Digital Transformation and Governance in MSMEs: Qualitative Perspectives on Financial Accountability in Banten, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 50–62.
- Lubis, I. (2021). The Role of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Recovery of the National Economic. *Syiah Kuala Law Journal*, 5(2), 238–251.
- Mohammed, N. F., Fahmi, F. M., & Ahmad, A. E. (2015). The influence of AAOIFI accounting standards in reporting Islamic financial institutions in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 31, 418–424.
- Murshed, N. A., & Ugurlu, E. (2023). Navigating the Digital Marketplace: A Holistic Model Integrating Social Media Engagement and Consumer Behavior Factors to Enhance Online Shopping Adoption. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 16(3).
- Nugraheni, S., Marchela, D. P., Al Ghozali, S. K., Ahya, M. K., Junaedi, M., & Roesner, M. (2023). Konsep Fenomenologi Edmund Husserl dan Relevansinya dalam Konsep Pendidikan Islam. *Akhlaqul Karimah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 143–154.
- Patton, J. M. (1992). Accountability and governmental financial reporting. *Financial Accountability & Management*, 8(3), 165–180.
- Ponelis, Shana, R. (2015). Using interpretive qualitative case studies for exploratory research in doctoral studies: A Case of information systems research in small and medium enterprises. *International journal of doctoral studies*, 10, 535–550.
- Purnomo, S., Nurmalitasari, N., & Nurchim, N. (2024). Digital transformation of

- MSMEs in Indonesia: A systematic literature review. *Journal of Management and Digital Business*, 4(2), 301–312.
- Rachmanti, D. A. A., Hariyadi, M., & Andrianto, A. (2019). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Batik Jumpat Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 16(1).
- Sehgal, V., Garg, N., & Singh, J. (2023). Impact of sustainability performance & reporting on a firm's reputation. *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, 14(1), 228–240. <https://doi.org/10.1007/s13198-022-01782-3>
- Sherman, W. R. (2011). Corporate Social Responsibility, Corporate Social Performance & Sustainable Stakeholder Accounting. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 1(3), 43–58. <https://doi.org/10.19030/iber.v1i3.3903>
- Sudana, I. P., Sukoharsono, E. G., Ludigdo, U., & Irianto, G. (2014). A Philosophical Thought on Sustainability Accounting. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(9), 1–10.
- Victor, L. (2008). Systematic Reviewing in the Social Sciences: Outcomes and Explanation. *Enquire*, 1(1), 1–12.
- Wulandari, T., Handayani, D., & Herman, L. A. (2024). Pengaruh Pelaku UMKM Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 81–92.
- Xing, Y., Horner, R. M. W., El-Haram, M. A., & Bebbington, J. (2009). A framework model for assessing sustainability impacts of urban development. *Accounting Forum*, 33(3), 209–224. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2008.09.003>